

Sejarah Perumusan Pancasila

Devia Octavionica¹, Inddy Idfila Kadwa², Marcello Farrel Evelyno³

¹²³ Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta

Corresponding author's email: park_devia@student.uns.ac.id, inddykadwa14@student.uns.ac.id, marcello.frl33@student.uns.ac.id

Abstrak: Makalah ini membahas tentang pentingnya sejarah perumusan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah berperan aktif dalam perkembangan Indonesia menjadi negara maju. Makalah ini akan mengulas sejarah perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa, seperti Soepomo, Muh. Yamin dan Ir. Soekarno, serta khususnya dalam mengatasi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Selain itu, makalah ini juga akan membahas bagaimana Pancasila menjadi wadah untuk mengkaji isu-isu keagamaan dan sekuler di Indonesia sembari tetap mengedepankan kebanggaan dan persatuan nasional. Dalam konteks masa kini, makalah ini juga membahas upaya Pancasila dalam menjaga stabilitas politik dan tatanan sosial di Indonesia. Selain itu, Pancasila terus menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia, memberikan panduan moral dan etika yang dibutuhkan untuk menegakkan masyarakat yang berkeadilan.

Kata kunci: Perumusan Pancasila; Dasar Negara; Tokoh Pengusul; Hasil Rumusan Pancasila

1. Pendahuluan

Sebelum NKRI terbentuk, dasarnya sudah tertanam dalam diri bangsa Indonesia berupa tradisi, budaya, dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai ini sudah ada, tertanam kuat dalam masyarakat, dan menjadi bagian mendasar dalam masyarakat menjalani kehidupan mereka. Akibatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam materi Pancasila tidak lain adalah nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia sebagai sasaran tujuan materialisme Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian dipilih dan secara terbuka ditetapkan sebagai landasan filsafat negara Indonesia. Proses materi Pancasila dirumuskan secara formal pada sidang pertama BPUPKI, sidang panitia "9", dan sidang kedua BPUPKI, pada akhirnya disahkan menjadi landasan filosofis negara republik Indonesia.

Pancasila bukan sekedar ideologi negara, tetapi juga merupakan falsafah hidup nasional yang terbentuk dari nilai luhur serta warisan nenek moyang sebelum berdirinya negara Indonesia. Pancasila adalah rumusan dan standar perilaku negara dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki harga diri dan martabat karena kelima sila yang terkandung di dalamnya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima pedoman ini dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar lebih mudah memahami sejarah perumusan Pancasila dengan identitas nasional Indonesia, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk negara berdasarkan prinsip kesejahteraan bersama yang dikenal sebagai Pancasila. Selain itu, Pancasila bukan hanya sebagai dasar

negara Indonesia, tetapi juga sebagai pandangan hidup, jiwa, dan karakter bangsa. Serta sebagai kesepakatan kolektif seluruh bangsa Indonesia ketika mereka mendirikan negara.

2. Sejarah Perumusan Pancasila

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama "Pancasila" yang artinya lima dasar.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

1. Proses Perumusan Pancasila

Proses Perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan, Anggota BPUPKI semula berjumlah 63 orang (termasuk seorang wakil ketua dari bangsa Jepang), namun kemudian menjadi 68 orang menjelang sidang tanggal 10 Juli 1945 (karena ditambah dengan enam orang anggota baru dan dikurangi satu orang yaitu wakil ketua dari bangsa Jepang). Secara sosiologis komposisi anggota BPUPKI itu terdiri atas 23 orang dari kalangan birokrat fungsional, 17 orang dari golongan pergerakan kebangsaan, 11 orang dari golongan "independen" atau swasta, dan 7 orang dari kalangan utama (guru dan mubalig).

a. Sidang BPUPKI dan Usulan-Usulan Rumusan Pancasila

Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei – 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei sidang dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Dai Nippon. Tanggal 29 Mei 1945 dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui yang nampak hanya 3 teks pidato yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno.

Antara Supomo, Muh. Yamin, dan Sukarno, sama-sama mengusulkan lima dasar negara.

Dasar negara yang diusulkan oleh Supomo sebagai berikut:

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir dan batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan rakyat.

Dasar negara yang diusulkan Moh. Yamin adalah sebagai berikut:

- 1) Peri Kebangsaan
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Peri Ketuhanan
- 4) Peri Kerakyatan

5) Kesejahteraan rakyat

Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno, yaitu:

- 1) Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
- 2) Peri Kemanusiaan (Internasionalisme)
- 3) Mufakat atau demokrasi
- 4) Kesejahteraan Sosial
- 5) Ketuhanan yang Maha Esa

Lima dasar tersebut Soekarno kemudian menyebutkan sebagai Pancasila. Panca berarti Lima, sedangkan sila berarti asas atau dasar.

b. Proses Perumusan Pancasila Setelah Pidato Soekarno

Setelah Soekarno berpidato mengajukan usul tentang tentang dasar-dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga ketua BPUPKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil. Tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara.

Panitia Kecil ini kemudian menunjuk sembilan orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan. Anggota Panitia Sembilan itu adalah Ki Bagus Hadikusuma, Kyai Haji Wakhid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, Moh. Hatta, H. Agus Salim dan Sukarno sebagai ketua.

Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia Sembilan (tanggal 22 Juni 1945) telah berhasil merumuskan Pancasila. Rumusan Pancasila dari Panitia sembilan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta (Djakarta Charter). Bunyi dari piagam Djakarta yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soekarno sebagai ketua Panitia Sembilan mengatakan, bahwa "ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya" merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan Kebangsaan. Sebenarnya banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta. Sebagai contoh, keberatan yang disampaikan oleh Latuharhary yang didukung oleh Wongsonegoro dan Husin Joyodiningrat dalam sidang panitia perancang UUD tanggal 11 Juli 1945.

Naskah awal "Pembukaan Hukum Dasar" yang dijuluki "Piagam Jakarta" ini di kemudian hari dijadikan "Pembukaan" UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana sini.

Secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, Pemerintah Penduduk Jepang di Jakarta menerbitkan maklumat yang berisi:

- 1) Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI).

- 2) Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945.
- 3) Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dikemerdekakan.

c. Pengesahan Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang- Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambuli (pembukaan) Undang-Undang Dasar negara tersebut.

Moh. Hatta menerima Nisyijima (pembantu Laksamana Mayda/Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia Merdeka.

Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama (Piagam Jakarta) "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut, bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) esok hari (tanggal 18 Agustus 1945).

Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama (dalam rumusan Piagam Jakarta) diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

3. Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila

Nilai-nilai Pancasila senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat Indonesia, baik dalam keyakinan maupun tingkah laku. Di antara bentuk penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
 - c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - a. Mewujudkan persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b. Saling mencintai sesama manusia
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa
 - d. Tidak semena-mena terhadap orang lain

- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
3. Sila Persatuan Indonesia
- Bangsa harus tetap menjunjung tinggi azas Bhinneka Tunggal Ika. Menolak paham yang menyimpang dari Pancasila. Memperjuangkan kepentingan Nasional. Bangsa sebagai bangsa Indonesia. Menentang kolonialisme dan mengembangkan pergaulan antar bangsa.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
- Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spritual. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik sosial, ekonomi, dan kebudayaan

4. Kesimpulan

Kesimpulannya, bahwa proses perumusan Pancasila terdiri dari 5 sila, masing-masing mengandung nilai-nilai penting seperti kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi negara Indonesia dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Referensi

H.A.W. Widjaja, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002

Lubis, Maulana Arafat, *Pembelajaran PPKn di SD/MI*, Medan: Akasha Sakti, 2018.

Sarinah, Muhtar Dahri & Harmani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sulasmo, Bambang Suteng, *Dasar Negara Pancasila*, Depok: PT Kanisus, 2015.

Paristiyanti Nurwardani, *Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Ristekdikti, 2016.